

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI ACEH

Mutia Arfiani^{1*}, Totok Rudianto², Naziatun Hikmah³, Emilda Kadriyani⁴,
Meutia Handayan⁵
^{1&2,3,4,5} *Politeknik Aceh
mutiaarfiani@politeknikaceh.ac.id, totok@politeknikaceh.ac.id

Received: 06-12-2023

Revised: 08-12-2023

Approved: 15-12-2023

Anggaran yang telah dibuat sangat berperan positif dalam berbagai kegiatan yang ada di pemerintahan. Kinerja suatu pemerintah dinilai dan dilihat melalui anggaran yang sudah dibuat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah sangat diharapkan agar pelayanan Masyarakat mendapatkan porsi yang relatif besar. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh periode anggaran 2018-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2018-2022 keseluruhannya cukup efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2018-2022 keseluruhan cukup efisien. Diharapkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh agar meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dengan memperbaiki dan mengevaluasi setiap kekurangan yang terjadi baik dari segi program dan juga anggaran.

Kata Kunci: Anggaran, Kinerja, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Efek dari krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki proses mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian. Anggaran yang telah dibuat sangat berperan positif sebagai alat pengendalian dalam berbagai kegiatan yang ada di pemerintahan. Kinerja suatu pemerintahan dinilai dan dilihat melalui anggaran yang sudah dibuat. Analisis efektivitas dan efisiensi sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah sangat diharapkan agar pelayanan Masyarakat mendapatkan porsi yang relatif besar. Efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas.

Awal pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengindikasikan telah terjadi pengalihan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah. Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Tanjung, 2020, p. 2) Dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun (2005) tentang akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah mengacu pada Standar Keuangan Daerah (SAP) yang berlaku. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan

kemiskinan.

Laporan kinerja Disbudpar Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yang signifikan dan berfluktuasi. Hal ini diakibatkan karena masuknya *Covid-19* di Indonesia yang berdampak pada seluruh kegiatan yang telah diagendakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh tidak dapat direalisasikan sesuai dengan perjanjian kerja (PK). Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang telah ditetapkan tersebut dialokasikan untuk pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% untuk vaksinasi *Covid-19* dan insentif tenaga Kesehatan daerah (Inakesda). Disbudpar melaporkan penggunaan anggaran untuk tahun 2018 hingga tahun 2020 memiliki tingkat interval $\leq 80\%$. Angka ini menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 penggunaan anggaran dalam lingkup disbudpar masih dikategorikan dalam kriteria cukup efektif dan cukup efisien. Dimana capaian realisasi anggaran itu sebesar 95,4 persen atau melebihi target sebesar 0,29 persen.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Objek penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Aceh merupakan salah satu unit Satuan kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang membidangi bidang kebudayaan dan pariwisata secara Islami sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Jenis dan Sumber data Penelitian

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kualitatif) (Sugiyono, 2013, p. 8).

Data kuantitatif dan kualitatif pada penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022 yang menunjukkan tingkat anggaran dan realisasi periode tersebut.
- b. Data kualitatif, berupa hasil wawancara, struktur organisasi dan uraian tugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Proyek Akhir adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Arikunto, 2013 dalam (Karomah & Yuni, 2021).

- a. Data Primer, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data (Sugiyono, 2013, p. 137). Adapun data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dan observasi dengan kepala bagian keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.
- b. Data sekunder, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen atau data yang sudah di publikasi, (Sugiyono, 2013, p. 137). Adapun data sekunder yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh pada Tahun 2018-2022 dan informasi mengenai visi, misi dan struktur organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode:

- Wawancara langsung, wawancara dilakukan secara lisan dengan kepala bagian keuangan dan staff bagian yang berhubungan dengan objek penelitian yang dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai:
- Visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
- Struktur organisasi dan pembagian tugas.
- Laporan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Metode Pembahasan Data

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian :

- Melakukan pengumpulan data anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.
- Mengelompokkan pos-pos anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
- Menghitung efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.
- Mengadakan tanya jawab dengan Kepala Bidang Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.
- Melakukan analisis anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Anggaran belanja merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan belanja yang digunakan. Pemerintah akan dinilai baik dalam kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang sudah dianggarkan. Efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat tidak melebihi yang sudah dianggarkan. Efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam menacapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengukuran tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja Mahsun, 2016 dalam (Sumenge, 2019).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil presentase maka tingkat efektivitas suatu entitas semakin efektif. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun (1996). standar kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut.

- Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

Tabel 1 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Persentase	Tingkat Efektivitas
2018	159.308.326.320	211.982.190.732	75,2%	Kurang Efektif
2019	139.189.643.400	161.895.967.987	86,0%	Cukup Efektif
2020	56.341.121.736	68.395.383.222	82,4%	Cukup Efektif
2021	102.371.504.839	128.584.110.203	79,6%	Cukup efektif
2022	198.052.375.433	206.901.337.062	95,7%	Sangat Efektif

Sumber : Data LRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan selama periode pada tahun 2018-2022 mengalami tingkat efektivitas yang berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami penurunan kadang mengalami peningkatan. Persentase tingkat efektivitas sebesar 75,2% pada tahun 2018 mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 10,8% menjadi 86,0%. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,6% menjadi 82,4%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,8% menjadi 79,6% hal tersebut tidak terlepas dari dampak *Covid-19* yang mengharuskan refocusing dan realokasi anggaran belanja sehingga program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada tahun 2022 kembali lagi mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16,1% menjadi 95,7%. Hal tersebut menandakan bahwa pada tahun 2022 terjadi perubahan kategori tingkat efektivitas yaitu menjadi sangat efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja Daerah

Tabel 4.6 menggambarkan hasil tingkat efektivitas dari tahun 2018-2022 yang terus mengalami fluktuasi dari tahun ketahunnya, dimana efektivitas tertingginya terjadi pada tahun 2022 dan terendahnya terjadi pada tahun 2018, dan sepanjang tahun anggaran 2018-2022 penurunan persentase paling drastis terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,6% dan peningkatan persentase tertingginya terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,1% sehingga mengakibatkan perubahan kriteria tingkat efektivitas menjadi sangat efektif. Terjadinya penurunan dan peningkatan tingkat efektivitas tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh guna mengetahui penyebab terjadinya tingkat efektivitas yang berfluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tingkat efektivitas terendah pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Banyak nya program-program yang ada pada tahun 2018, bahkan terdapat juga program unggulan yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) menyebabkan terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya dan mengalami dana

defisiensi sehingga program yang sudah dianggarkan terpaksa tidak berjalan lancar. Terdapat beberapa Program yang ditengah jalan mengalami permasalahan yang serius baik dalam hal anggaran, SDM, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya penurunan efektivitas pada tahun 2018. Di antara program tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke 7.
 - b. Festival pulau banyak 2018
 - c. Gayo Alas Mountain Internasional (GAMI) Festival 2018
 - d. Aceh Internasional Surfing Championship 2018 di Simeulu
2. Terdapat realisasi anggaran belanja yang dicatat nol yaitu pada belanja barang dan jasa, belanja bangunan dan gedung. Dicap nol pada realisasi anggaran belanja tersebut dikarenakan dana anggaran belanja yang sudah ditetapkan tidak cair.

Dari beberapa hal-hal terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor dengan beberapa hal berikut ini:

1. Pada Poin pertama, hal tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa SDM per bidang yang lambat menjalankan program. Dana anggaran sudah ada namun program yang sudah direncanakan per triwulan lambat dalam penggunaannya. Sehingga dari pihak Pemerintah pusat mendefisiensi dana yang sudah dianggarkan dan berpengaruh pada tingkat efektivitas pada belanja barang dan jasa.
2. Pada poin kedua terdapat tingkat pencairan yang rendah, dibuktikan dengan terdapatnya utang untuk menjalankan belanja barang dan jasa dan belanja bangunan dan gedung.
3. Selain kedua hal diatas pengaruh lain yaitu terdapat pada penyusunan anggaran. Bidang yang Menyusun anggaran hanya satu bidang, sedangkan yang menjalankan terdapat beberapa bidang. Sehingga kurang koordinasi antara penyusun anggaran dan bidang yang menjalankan program yang sudah dianggarkan.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat efektivitas yang sangat drastis pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat banyak program yang berhasil direalisasikan, diantara program tersebut adalah:
 - a. Disbudpar Aceh telah menyelenggarakan seratus event khazanah piasan nangroe dan tiga charisma event Nusantara yang terealisasi seratus persen.
 - b. Adanya peningkatan kelas museum Aceh dan UPTD Taman Budaya Aceh dari kelas B menjadi kelas A.
 - c. 17 Karya Budaya Aceh ditetapkan pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda (WBTb) Indonesia.
 - d. Menerbitkan sertifikasi profesi untuk 152 pekerja kreatif dan seni pertunjukan berkerja sama dengan badan nasional sertifikasi prestasi (BNSP).

Dari beberapa hal-hal terjadi diakibatkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hal tersebut diakibatkan karena para SDM bidang sudah dievaluasi sehingga SDM tersebut telah dimaksimalkan kinerjanya. Dana anggaran yang telah ditetapkan dan program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan realisasi anggarannya sesuai dengan yang di targetkan.
2. Disbudpar Aceh telah mengevaluasi kekurangan sebelumnya terkait

partisipasi penyusunan anggaran, setiap bidang telah ikut serta dalam menyusun anggaran, sehingga terjadi keselarasan antara program dengan anggaran yang telah digunakan.

Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Suatu Entitas pemerintahan daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah dan melakukan efisiensi belanja. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input. Output yang dimaksud dalam proyek akhir ini yaitu realisasi anggaran belanja langsung. Sedangkan yang dimaksud Input dalam penelitian ini adalah total realisasi anggaran belanja Mahsun, 2016 dalam (Sumenge, 2019).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Semakin rendah persentase kriteria tingkat efisiensi maka semakin efisiensi anggaran belanja yang digunakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut (Sumenge, 2019).

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisiensi.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisiensi
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisiensi
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisiensi
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisiensi.

Berikut ini penghitungan tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh tahun 2018-2022.

Tabel 2 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	Tingkat Efisiensi
2018	104.651.711.935	159.308.326.319	65,7%	Efisiensi
2019	119.208.700.130	139.189.643.400	85,6%	Cukup Efisiensi
2020	39.732.052.577	56.341.121.736	70,5%	Efisiensi
2021	82.806.449.038	102.371.504.839	80,9%	Cukup Efisiensi
2022	176.517.008.533	198.052.375.433	89,1%	Cukup Efisiensi

Sumber : Data LRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 65,7% menjadi 85,6% pada tahun 2019. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai penurunan tingkat efisiensi, tetapi masih dalam kategori yang cukup efisien. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan tingkat efisiensi yang cukup besar sebesar 15,6% menjadi 70,5% dan memiliki kriteria di tingkat efisien, hal tersebut tidak terlepas dari dampak refocusing dan realokasi anggaran belanja pada tahun 2020 yang mengakibatkan minim nya anggaran pada tahun tersebut sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan tingkat 10,4% menjadi 80,9% dan merubah kategori tingkat menjadi cukup efisien Pada tahun 2022 juga mengalami penurunan tingkat menjadi 89,1% dan masih dalam kategori cukup efisien. Secara keseluruhan, anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan tahun 2018-2022 masuk dalam kategori cukup efisien dengan tingkat efisiensi diatas 80% yang masuk kategori cukup efisien,

Faktor- faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Anggaran Belanja Daerah

Tabel 2 menggambarkan hasil tingkat efisiensi dari tahun 2018-2022 yang mengalami fluktuasi, namun kriteria tingkat efisiensi yaitu cukup efisien dan hanya pada tahun 2020 tingkat efisiensi memasuki kategori efisien. Terjadinya tingkat efisien yang cukup efisien tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh guna untuk mengetahui penyebab terjadinya tingkat efisiensi yang cukup efisien.

Tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang cukup efisien. Penghitungan dengan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi total anggaran belanja menandakan bahwa dapat menggunakan sumber daya (input) yang ada dengan seminimal mungkin sehingga dapat menghasilkan Output yang baik.

Pada dasarnya efisiensi ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada fakto-faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung. Berikut ini beberapa Kegiatan atau program yang masuk dalam anggaran belanja langsung tahun anggaran 2018-2022:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- e. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Kebudayaan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- h. Program Pemasaran Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2018-2022 melalui 8 program yang sudah di jalankan. Dinas ini sudah berusaha menggunakan dana yang seminimal mungkin untuk menjalankan 8 program dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan belanja tidak langsung dalam

laporan realisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS).

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat terjadinya tingkat efisien

1. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya sudah berdasarkan struktur organisasi yang ada. Seluruh program yang sudah direncanakan dapat terlaksana secara cukup efisien berdasarkan bidang masing-masing yang bersangkutan dengan 8 program diatas. Sehingga, tidak terdapat tumpang tindih fungsi menjalankan tugas disetiap jabatan. Ketepatan penggunaan dana dalam menjalankan program dapat seminimal mungkin dan program berjalan lancar karena terdapat koordinasi yang stabil setiap jabatan

2. Faktor Pimpinan

Faktor ini sangat menjadi penentu utama, apabila seorang kepala Dinas tidak dapat memimpin maka dinas tersebut akan rusak. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh memiliki kepala Dinas yang berkompeten. Apabila terdapat pegawainya yang lambat dalam menjalankan program, maka kepala dinas akan memberikan sanksi tegas. Tujuannya adalah agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh selalu mengontrol dan mengarahkan kebutuhan belanja pada suatu program pada setiap pegawainya. Sehingga, dana yang dikeluarkan dapat seminimal mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Karomah, D., & Yuni, E. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Sela. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Peraturan Menteri RI. (1996). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah. (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 09 Desember, 105. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah RI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.* 1–24. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (1st ed., pp. 142–143). ALFABETA.
- Sumenge, A. S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81.
- Tanjung, A. hafiz. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). ALFABETA, cv.
- Tempoh, R., Karamoy, H., & Pinatik, S. (2021). Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor Pada Pt. Pln (Persero) Up2B Sistem Minahasa. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1753–1761.